

Dampak dan Relevansi Dinamika Politik Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Konflik Politik yang Terjadi di Negara-Negara Muslim Era Moderen

Nini Ismayani¹, Susmihara², Umar Sulaiman³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Korespondensi Email: niniismayani46@gmail.com[✉]

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dampak dinamika politik pemerintahan Ali khususnya setelah berakhirnya masa *khulafaur rasyidin* yaitu masa kepemimpinan Muawiyah di Dinasti Umayyah yang mengubah sistem pemerintahan dari bentuk demokrasi menjadi monarki, 2) menganalisis relevansi dinamika politik pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib dengan konflik politik yang terjadi di negara-negara muslim era moderen. Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan *historis* (sejarah), pendekatan politik, dan pendekatan agama. Penelitian ini tergolong *library research* dengan data *deskriptif kualitatif* yang dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik politik pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib berakibat berdampak terhadap perubahan sistem pemerintahan dari bentuk khilafah menjadi dinasti. Dinamika politik tersebut ternyata memiliki relevansi dengan pemerintahan di negara-negara muslim era moderen seperti di Irak dan di Indonesia yang mengalami konflik politik yang sama yaitu berawal dari krisis legitimasi kekuasaan.

Kata kunci: Dampak, Relevansi, Konflik Politik

Submitted	: 3 January 2026
Revised	: 25 January 2026
Acceptance	: 29 January 2026
Publish Online	: 30 January 2026

Pendahuluan

Dinamika politik yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki dampak struktural yang signifikan terhadap arah perkembangan sistem pemerintahan Islam pada periode selanjutnya. Konflik internal yang berlarut-larut, melemahnya otoritas pusat, serta fragmentasi politik umat Islam menciptakan kondisi yang memungkinkan lahirnya pola kekuasaan baru yang berbeda dari model kepemimpinan sebelumnya. Dalam konteks inilah, naiknya Mu'awiyah bin Abi Sufyan sebagai penguasa menandai titik balik penting dalam transformasi sistem pemerintahan Islam dari model khilafah berbasis musyawarah menuju sistem monarki dinasti.

Ketika Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengambil alih kekuasaan, ia mewarisi kondisi politik yang rapuh dan masyarakat yang lelah oleh konflik berkepanjangan. Situasi ini mendorong lahirnya sistem pemerintahan yang menitikberatkan pada stabilitas politik, sentralisasi kekuasaan, dan efisiensi administrasi. Perubahan paling mendasar tampak pada pengalihan mekanisme suksesi kepemimpinan dari proses musyawarah menuju sistem pewarisan kekuasaan secara turun-temurun. Penetapan Yazid bin Mu'awiyah sebagai penerus kekuasaan menjadi simbol nyata pergeseran tersebut dan sekaligus menandai lahirnya Dinasti Umayyah sebagai entitas politik monarkis.

Ransformasi sistem pemerintahan ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman konflik pada masa Khalifah Ali. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa model kepemimpinan ideal-normatif tanpa dukungan struktur kekuasaan yang kuat rentan terhadap perpecahan internal. Oleh karena itu, Dinasti Umayyah membangun sistem politik yang lebih terorganisasi dengan menempatkan loyalitas politik, kekuatan militer, dan birokrasi sebagai pilar utama pemerintahan. Langkah ini, meskipun berhasil menciptakan stabilitas jangka pendek, membawa konsekuensi berupa berkurangnya partisipasi politik umat dan melemahnya prinsip egalitarian yang sebelumnya menjadi ciri utama sistem khilafah.

Dalam konteks kontemporer, konflik politik yang terjadi di berbagai negara Muslim menunjukkan pola yang, dalam batas tertentu, memiliki kemiripan struktural dengan dinamika politik pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Konflik perebutan kekuasaan, polarisasi elite politik, penggunaan legitimasi agama dalam kontestasi politik, serta melemahnya otoritas negara akibat fragmentasi internal merupakan fenomena yang kerap ditemukan di negara-negara Muslim modern. Kondisi tersebut tampak dalam konflik politik di kawasan Timur Tengah salah satunya terjadi di Irak, selain itu permasalahan serupa juga terjadi di Indonesia walaupun tidak sampai terjadi pembenrontakan secara fisik.

Relevansi dinamika politik masa Khalifah Ali dengan konflik politik modern tidak terletak pada kesamaan peristiwa secara literal, melainkan pada pola dasar konflik dan mekanisme kekuasaan yang berulang dalam konteks yang berbeda. Pergulatan antara idealisme kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan dan realitas politik yang sarat kepentingan menjadi benang merah yang menghubungkan kedua konteks tersebut. Oleh karena itu, kajian historis terhadap pemerintahan Khalifah Ali tidak hanya penting sebagai upaya rekonstruksi sejarah, tetapi juga sebagai kerangka analitis untuk memahami persoalan politik kontemporer di dunia Islam.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dengan teknik penelitian sejarah melalui pendekatan yang lebih *deskriptif* dan analisis untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Penelitian yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam penelitian ini merujuk pada sumber tertulis yang disebut *liberary research* atau dikenal dengan istilah kajian pustaka. Selain itu juga mengambil dari beberapa sumber tertulis lainnya berupa jurnal ataupun artikel sejenis lainnya.¹

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang berusaha menganalisis secara logis terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu khususnya mengenai dampak dan relevansi dinamika politik pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Metode penelitian sejarah lazim juga disebut metode sejarah, metode itu sendiri berarti suatu

¹ Juliasnyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Cet.I Jakarta: Kencana, 2011), h. 32.

cara, jalan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien.²

Hasil

Perubahan Konsep Legitimasi Kekuasaan Dalam Islam

1. Masa Khalifah Hasan bin Abi Thalib

Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, ia digantikan oleh putranya Hasan bin Abi Thalib menjadi khalifah. Orang pertama yang membaiaatnya adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ia berkata "Ulurkanlah tanganmu, aku akan membaiaatmu atas dasar kitabullah dan sunnah Rasulullah". Baiat tersebut terjadi pada bulan Ramadhan tahun 40 H pada hari wafatnya Ali bin Abi Thalib yang kemudian diikuti oleh orang banyak. Pada saat itu Qais bin Sa'ad yang mewakili 40.000 tentara yang membela Ali kemudian meminta agar Hasan bersedia untuk memerangi penduduk Syam.³

Sebenarnya Hasan tidak ingin terjadi peperangan lagi, namun karena dorongan yang besar pada saat itu ia terpaksa melakukannya. Hasan mengumpulkan pasukan dengan jumlah yang sangat banyak dan menunjuk Qais bin Sa'ad sebagai panglima detasemen yang dikirim ke depan bersama 12.000 pasukan lainnya. Kemudian ia bergerak dibelakangnya menuju Syam untuk memerangi Muawiyah beserta pasukannya. Ketika melewati wilayah al-Mada'in, ia mengirim pasukannya kedepan dan menunggunya dalam tenda militer di tengah kota. Namun tiba-tiba ada yang berteriak, "ketahuilah, Qais bin Sa'ad bin Ubadah telah terbunuh!"⁴

Pasukan menjadi kacau dan saling menyerang, mereka bahkan menyerang kemah Hasan dengan cara menarik paksa permadani yang dipakai duduk oleh Hasan dan menikamnya. Hasan pergi berlindung ke istana putih di kota al-Mada'in dengan keadaan luka parah. Hasan yang melihat keadaan pasukannya tersebut, kemudian mengirim surat yang berisi ajakan perdamaian kepada Muawiyah yang pada saat itu dalam perjalanan dari Syam dan singgah di Maskin. Setelah menerima surat tersebut Muawiyah mengirim utusannya Abdullah bin Amr dan Abdurrahman bin Samurah ke Kufah untuk bertemu dengan Hasan. Kedua pihak menyepakati persyaratan perdamaian, sehingga Hasan bersedia memberikan jabatan khalifah kepada Muawiyah meskipun keputusannya itu ditentang oleh saudaranya Husein.⁵

Hasan menjabat sebagai khalifah sekitar enam bulan, ia menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah setelah melakukan perdamaian dengan syarat bahwa khilafah setelah Muawiyah akan dikembalikan kepadanya, Muawiyah tidak boleh menuntut apapun dari penduduk Madinah, Hijaz dan Irak atas apa yang terjadi pada masa pemerintahan Ali. Muawiyah menyetujui syarat tersebut sehingga Hasan resmi turun dari jabatannya pada tahun 41 H dan meninggalkan Kufah menuju Madinah dan menetap disana.⁶

² Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), h. 103.

³ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*, (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 534.

⁴ Imam Ibnu Katsir, *Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung*, (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2002), h. 702.

⁵ Imam Ibnu Katsir, *Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung*, h. 704.

⁶ Imam As-Suyithi, *Tarikh Khulafa'*, (Cet. I; Jakarta: Qisthi Press, 2019), h. 203-204.

Hasan meninggal dunia di Madinah karena diracun oleh Ja'dah binti al-Asy'ats bin Qais istrinya sendiri, ia melakukan hal tersebut karena ditipu oleh Yazid bin Mu'awiyah yang menyuruhnya untuk meracuni Hasan dengan imbalan akan menikahinya. Hasan wafat pada tahun 49 H, ada juga yang mengatakan pada tanggal 5 Rabi'ul Awal tahun 50 H, dan ada juga yang berpendapat pada tahun 51 H.⁷

2. Perubahan Sistem Pemerintahan Dari Khilafah Menjadi Dinasti Pada Masa Kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan (Dinasti Umayyah)

a. Muawiyah bin Abi Sufyan dan Pembentukan Sistem Pemerintahan Baru Dalam Dinasti Umayyah

Pemerintahan Islam memasuki babak baru setelah berakhirnya masa kekhalifahan, Dinasti Umayyah dibawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan muncul sebagai rezim baru dalam menjalankan kekuasaan politik Islam dan membawa perubahan *fundamental* dalam sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang dulu bersifat demokratis dan *partisipatif* sejak pada masa Rasulullah sampai masa kekhalifahan kemudian berganti menjadi pemerintahan yang tertutup, *otoriter* dan *hinkis* dibawah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan menerapkan sistem pergantian pemimpin secara turun temurun.⁸

Muawiyah bin Abi Sufyan Syskhr bin Harb bin Umayyah bin Abd. Syam bin Abdi Manaf bin Qushay Al-Amawi merupakan keturunan ketiga dari Umayyah salah seorang pemimpin suku Quraisy, sehingga anak cucu dari keturunan Umayyah dihubungkan dengan nama Bani Umayyah. Pada usia 23 tahun Muawiyah masuk Islam bersama ayahnya Abu Sufyan pada saat peristiwa *Fathu Makkah*. Muawiyah yang memiliki kecerdasan dan pandai menulis membuat ia lebih cepat dekat dengan Rasulullah dan para sahabat lainnya sehingga ia diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu penulis wahyu, ia juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah baik secara langsung maupun melalui perantara.⁹

Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pendiri Dinasti Umayyah dan orang pertama yang mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi monarki. Perintisan Dinasti Umayyah yang dilakukan oleh Muawiyah diawali dengan menolak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib dan berperang melawannya, ia kemudian melakukan perdamaian dengan cara *arbitrase* dengan Ali yang secara politik sangat menguntungkan bagi pihaknya. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia akibat dibunuh oleh kaum khawarij, Hasan bin Abi Thalib yang merupakan anaknya diangkat menjadi khalifah berikutnya. Muawiyah kemudian kembali melakukan perdamaian dengan Hasan yang akhirnya kekhalifahan diserahkan kepadanya dan kemudian mengubah sistem pemerintahan dari bentuk khalifah menjadi dinasti atau kerajaan.¹⁰

Dalam mempertahankan sistem pemerintahannya, muncul unsur otoriter, kekuasaan mutlak, kekerasan, diplomasi yang dibumbui dengan tipu daya dan hilangnya keteladanan dari Nabi Muhammad saw. mengenai musyawarah dalam menentukan pemimpin. Namun terlepas dari sisi negatifnya, sistem pemerintahan baru yang

⁷ Imam As-Suyithi, *Tarikh Khulafa'*, h. 203-205.

⁸ Hasaruddin, *Muawiyah Ibn Abi Sofyan Dari Syura Ke Monarki*, (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2014), h. 165.

⁹ Hasaruddin, *Muawiyah Ibn Abi Sofyan Dari Syura Ke Monarki*, h. 168.

¹⁰ Fitri Yeni, *Sejarah Peradaban Muslim di Damaskus (Syiria) (Masa Daulah Umayyah)*, AL-BAHRU: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, III, No. 2, (2024), h. 163.

dibentuk Muawiyah dalam Dinasti Umayyah menjadi babak baru dalam kemajuan peradaban Islam, hal ini terbukti terjadinya kemajuan dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan dan kebudayaan. Sejarah juga mencatat bahwa Dinasti Umayyah merupakan dinasti Arab pertama yang mampu memainkan peran penting dalam perluasan wilayah serta menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.¹¹

Dinasti Umayyah di Syiria berlangsung selama 90 tahun dengan 14 khalifah yang memimpin. Pada masa tersebut gelar pemimpin masih disebut istilah khalifah bukan raja meskipun pemerintahannya berbentuk kerajaan, namun istilah khalifah yang dimaksud berbeda pada zaman kekhalifahan dulu. Khalifah yang dimaksudkan adalah “*Khalifah Allah*” artinya pemimpin atau penguasa yang diangkat oleh Allah, sedangkan khalifah sebelumnya disebut “*Khalifah Rasul*” yang artinya pemimpin pengganti Rasulullah.¹²

Muawiyah selaku khalifah pertama Dinasti Umayyah (661-680 M) yang membentuk pemerintahannya menjadi sistem kerajaan atau *monarchi herediteris* (kerajaan turun-temurun), ia juga merupakan khalifah pertama yang mengangkat pengawal atau penjaga. Kepemimpinan secara turun-temurun dimulai pada saat Muawiyah mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota dan menyuruh rakyat setia kepadanya. Hal ini berawal dari ide al-Mughirah ibn Syu’bah yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Kufah di masa Muawiyah, ia yang memberikan saran kepada Muawiyah. Bentuk pemerintahannya bisa dikatakan mencontoh pemerintahan monarki di Persia dan Baizantium.¹³

Muawiyah berhasil dalam membuat kebijakan-kebijakan progresif dan sukses mengembangkan perekonomian masyarakat pada saat itu. Ia mampu menggabungkan beberapa wilayah kekuasaannya menjadi sebuah provinsi dan mengangkat seorang gubernur atau amir yang bertanggungjawab sebagai pemimpin di daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mensentralisasikan wilayah kekuasaannya dalam menjalankan pemerintahan baik dalam bidang ekonomi, keamanan maupun pertahanan.¹⁴

Pada masa kepemimpinan Muawiyah mengalami perubahan dan kemajuan dalam bidang pemerintahan, perubahan yang signifikan dan memiliki pengaruh besar karena diubahnya sistem demokrasi atau *syura* yaitu memilih khalifah dengan cara musyawarah menjadi sistem monarki atau turun-temurun, usaha-usaha yang lain juga dilakukan, yaitu:¹⁵

- 1) menyalin semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah dalam register departemen tersebut.
- 2) Mendirikan Pelayanan Pos (*Diwan al-Barid*) yang menangani masalah pengiriman pusat diberbagai wilayah.
- 3) Membentuk dua sekretariat yakni imperium pusat dan sekretariat provinsi.

¹¹ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Terlengkap Peradaban Islam: Menelusuri Jejak-Jejak Agung Peradaban di Barat Dan Timur*, (Cet. I; Yogyakarta: Noktah, 2017), h. 132.

¹² Fitri Yeni, *Sejarah Peradaban Muslim di Damaskus (Syiria) (Masa Daulah Umayyah)*, h. 163.

¹³ Munawir Haris, *Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah*, TASAMUH: Jurnal Studi Islam, X, No. 2, (2018), h. 396-398.

¹⁴ Fatkhul Wahab, *Sejarah dan Perkembangan Dinasti Bani Umayyah Dalam Dunia Islam*, Jurnal Pustaka, XIII, No. 2, (2023), h. 124.

¹⁵ Dahlan, *Sejarah Peradaban Islam*, (Cet.I; Gowa: Alauddin University Press, 2013), h. 50-51.

4) Mengangkat *Shahib al-Kharaj* yang khusus memungut pajak dan jabatan ini tidak terikat dengan gubernur.

Ada lima dewan di pusat pemerintahan, yaitu dewan militer (*diwanul al-jund*), dewan keuangan (*diwanul kharraj*), dewan surat-menyurat (*diwanul rasail*), dewan kepolisian (*diwanul al-syurtak*) dan dewan kehakiman (*diwanul al-Qodli*).¹⁶ Selain mengangkat Majelis Penasehat sebagai pendamping pemerintahan Dinasti Umayyah juga dibantu oleh beberapa orang “*al-Kuttab*” atau sekretaris untuk melaksanakan tugasnya, yaitu:¹⁷

- 1) *Katib al-Jund*: sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan.
- 2) *Katib al-Kharraj*: sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara.
- 3) *Katib ar-Rasail*: sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan pembesar-pembesar setempat.
- 4) *Katib al-Syurthak*: sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.
- 5) *Katib al-Qodli*: sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat.

Pengawal khalifah (*al-hijabah*) merupakan jabatan tertinggi setelah khalifah yang bertugas dalam mengawal dan menjaga keselamatan khalifah sehingga tidak ada yang bisa menghadap khalifah tanpa ada izin dari para pengawal terlebih dahulu. Sedangkan untuk organisasi kepolisian yang awalnya bagian dari kehakiman kemudian dipisah dan berdiri sendiri yang bertugas dalam mengawasi dan mengurangi kejahatan.¹⁸

Selain mengubah sistem pemerintahannya, Muawiyah juga memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang melambangkan zaman imperium baru. Daulah Umayyah kemudian melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat yaitu sebuah imperium Arab. Ekspansi yang berhasil dilakukan yaitu ke wilayah-wilayah seperti Tunisia, Khurasan sampai ke Oxus, Afganistan sampai ke Kabul dan Bizantium, bahkan sampai ke India dan menguasai Balukistan, Sind dan daerah Punjab sampai Malan.¹⁹

Masa pemerintahan Dinasti Umayyah hampir mencapai satu abad lamanya, yaitu tepatnya berlangsung selama 90 tahun dengan empat belas khalifah atau pemimpin. Meskipun Dinasti Umayyah memiliki empat belas khalifah selama masa pemerintahannya, namun hanya lima khalifah yang dianggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan prestasi-prestasinya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz dan Hisyam bin Abdul Malik.²⁰

b. Pengangkatan Yazid bin Muawiyah Sebagai Putra Mahkota Sekaligus Khalifah Pengganti Muawiyah bin Abi Sufyan

Pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota sekaligus khalifah yang menggantikan ayahnya Muawiyah setelah wafat mendapat kritikan dan ketidaksetujuan dari beberapa pihak. Muawiyah selaku khalifah pada saat itu dianggap melakukan tindakan menyimpang dalam metode pemilihan pemimpin karena menggunakan cara

¹⁶ Fitri Yeni, *Sejarah Peradaban Muslim di Damaskus (Syiria) (Masa Daulah Umayyah)*, h. 165.

¹⁷ Fitri Yeni, *Sejarah Peradaban Muslim di Damaskus (Syiria) (Masa Daulah Umayyah)*, h. 165-166.

¹⁸ Fatkhul Wahab, *Sejarah dan Perkembangan Dinasti Bani Umayyah Dalam Dunia Islam*, h. 128.

¹⁹ Munawir Haris, *Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah*, h. 399.

²⁰ Rizem Aizid, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, h. 252.

yang berbeda sejak masa *Khulafur Rasyidin* dari Abu Bakar sampai Hasan bin Ali yang menggunakan sistem demokrasi dengan cara musyawarah.²¹

Perubahan ini tidak gampang diterima oleh beberapa pihak dengan alasan lain bahwa masih ada putra-putra para sahabat yang dianggap lebih berhak atas kekhalifahan tersebut dibandingkan Yazid, seperti Husain bin Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin az-Zubair. Namun Muawiyah tidak menyerah dan berusaha meyakinkan masyarakat agar menerima keputusannya dengan cara memberikan motivasi bahkan ancaman hukuman mati sehingga pada akhirnya pembaiatan Yazid bin Muawiyah berhasil dilakukan.²²

Perubahan sistem pemilihan khalifah tersebut mengakibatkan terjadi perlawanan dari pihak yang tidak setuju terutama dari Husein yang menolak berbait kepada Yazid. Hal ini juga didasarkan atas perjanjian antara saudaranya Hasan dengan Muawiyah yang berjanji akan mengembalikan kekhalifahan Islam, namun ternyata Muawiyah memberikan kekhalifahan tersebut kepada anaknya. Perlawanan di daerah juga terjadi seperti di Irak yang masyarakatnya tidak mengakui kekhalifahan Yazid dan meminta agar Husein datang ke Irak untuk dibaiat. Pada saat Husein dalam perjalanan menuju kesana kemudian Yazid memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad untuk mengutus al-Hurra bin Yazid at-Tamimi dengan membawa 1.000 pasukannya untuk menghadang Husein.²³

Ketika Husein tiba di sebuah tempat yang bernama Karbala, tibalah 4.000 pasukan lainnya yang dipimpin oleh Umar bin Saad dan terjadilah peperangan yang tidak seimbang dari kedua pasukan tersebut karena Husein hanya memiliki pasukan 73 orang sehingga semua pasukannya tewas, sedangkan Husein meninggal dipanah oleh Amr bin Dzi al-Jausyan dan memenggal kepala Husein, riwayat lain mengatakan yang memenggalnya adalah Sinan bin Anas. Kepala Husein dibawa ke Damaskus ke hadapan Yazid sedangkan tubuhnya di makamkan di Karbala.²⁴

Adapun alasan Muawiyah mengangkat putranya sebagai putra mahkota sekaligus khalifah penggantinya karena belum stabilnya situasi politik setelah pergantian kepemimpinan sebelumnya. Muawiyah takut terjadi perpecahan umat lagi jika diadakan musyawarah, selain itu keinginan *ahlul halli wal aqdi* (dewan permusyawaratan) yang anggotanya dari Bani Umayyah yang hanya menginginkan pengganti khalifah dari kaum mereka sendiri.²⁵

Relevansi Dinamika Politik Pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib Dengan Konflik Politik Yang terjadi di Negara-Negara Muslim Era Moderen

1. Konflik Politik di Irak dan Relevansinya Dengan Dinamika Politik Pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Problematika politik yang terjadi pada masa kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M) merupakan konflik politik Islam yang besar sepanjang sejarah. Hal ini dilatarbelakangi terjadinya perselisihan mengenai legitimasi kekuasaan yang diakibatkan karena terbunuhnya khalifah sebelumnya yaitu Utsman bin Affan sehingga membuat kepemimpinan berikutnya yaitu khalifah Ali bin Abi Thalib tidak diakui oleh beberapa pihak. Akibatnya terjadi banyak konflik besar seperti peperangan antar sesama umat Islam yang menjadi awal munculnya teologi atau aliran baru.

²¹ Abdussyafi Muhammad Abdul Lathif, *Al-Alam Al-Islami fil Ashr Al-Umawi*, (Cet. I; Kairo: Dar As-Salam, 2008), h. 156.

²² Abdussyafi Muhammad Abdul Lathif, *Al-Alam Al-Islami Fil Ashr Al-Umawi*, h. 157.

²³ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Terlengkap Peradaban Islam: Menelusuri Jejak-Jejak Agung Peradaban Di Barat Dan Timur*, h. 136-137.

²⁴ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Terlengkap Peradaban Islam: Menelusuri Jejak-Jejak Agung Peradaban Di Barat Dan Timur*, h. 137-138.

²⁵ Abdussyafi Muhammad Abdul Lathif Lathif, *Al-Alam Al-Islami Fil Ashr Al-Umawi*, h.159.

Konflik politik yang terjadi pada masa tersebut juga dapat kita saksikan di negara-negara muslim era moderen, salah satunya yaitu di Irak yang memiliki konflik politik yang hampir sama dengan konflik politik pada masa Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu pada pembahasan berikutnya penulis akan membahas mengenai konflik politik yang terjadi di Irak era moderen untuk menggambarkan keterkaitan atau relevansinya dengan dinamika politik pada masa Ali bin Abi Thalib dengan tujuan agar dinamika politik yang terjadi pada masa itu tidak hanya sekedar cerita sejarah yang hanya dapat kita baca secara berulang, melainkan dapat kita jadikan pelajaran sampai sekarang ini.

Konflik politik pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib sebenarnya banyak memiliki relevansi dengan beberapa negara Islam di era moderen sekarang ini seperti di Suriah, Yaman, Sudan, Libya ataupun di Irak. Namun pada pembahasan kali ini penulis hanya akan mengangkat dan memfokuskan pembahasannya pada salah satu negara saja yaitu di Irak dengan alasan selain karena memiliki konflik politik yang sama dengan konflik politik pada masa Ali, Irak dulunya yang kita kenal dengan sebutan Kufah merupakan pusat pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib sehingga menurut penulis lebih gampang dalam menggambarkan kesamaan atau relevansi antara sejarah politik pada masa Islam klasik yang ternyata memberikan cerminan terhadap pemerintahan Islam era moderen.

a. Konflik Politik di Irak Era Moderen

Irak merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki sejarah panjang mengenai perpecahan sektarian antara Syiah dan Sunni. Pada awal berdirinya Irak moderen tahun 1921 telah terjadi ketimpangan dari kedua sektarian tersebut yang mana dalam pemerintahan mayoritas dipegang oleh Sunni minoritas, sedangkan Syiah mayoritas selalu tersingkirkan dari pemerintahan.²⁶ Perbedaan dalam legitimasi kekuasaan tersebut kemudian berubah menjadi perbedaan teologis yang mana Sunni berpendapat bahwa pemimpin ditentukan dengan musyawarah (*syura*) atau *baiat*, sedangkan Syiah meyakini bahwa kepemimpinan adalah hak *ilahi* (*imamah*) yang telah ditetapkan bahwa Ali dan keturunannya yang berhak atas hal tersebut.

Pada masa kepemimpinan Saddam Hussein jarang terjadi konflik karena ia memimpin secara otoriter, namun setelah rezim Saddam Hussein berakhir banyak terjadi konflik antar kelompok etnis atau agama, bahkan setelah berakhirnya invasi Amerika Serikat, NATO dan pasukan Amerika masih menetap di Irak terjadi berbagai pergantian pemerintahan baik sipil maupun militer, sedangkan konflik internal antara Syiah dan Sunni akibat perebutan kekuasaan terus berlanjut. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jatuhnya rezim Saddam Hussein membuat situasi di Irak semakin kacau karena tidak ada kekuatan besar yang dapat mengatur sekte-sekte di Irak sehingga terjadi perebutan kekuasaan.²⁷

Setelah Amerika Serikat berhasil menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein pada Perang Teluk Tiga, terjadi kekosongan dalam pemerintahan, Saddam Hussein selaku pemimpin Irak dihukum gantung pada tahun 2006. Amerika Serikat kemudian mendirikan pemerintahan sementara, namun muncul perlawanan dari rakyat Irak karena menganggap Amerika Serikat sebagai penjajah. Rakyat Irak yang menolak pemerintahan sementara membentuk milisi bersenjata dan berhasil membuat Amerika Serikat menarik pasukannya pada tahun 2011 yang menjadi tanda berakhirnya Perang Teluk Tiga.²⁸

Runtuhnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003 menjadi penyebab konflik politik di Irak yang berawal dari terjadinya krisis legitimasi dan perpecahan sektarian di

²⁶ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah, Analisa Perbandingan*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1986), h. 54-55.

²⁷ Aisyah Nabila, *Perubahan Sosial dan Politik Irak Pasca Invasi Amerika Serikat*, Jurnal Ilmu Budaya, (2023).

²⁸ Via Nurhasanah, *Problematika Konflik Umat Islam di Suriah dan Irak Tahun 2002-2011*, Jurnal of Islamic History, I, No. 1, (2025), h. 61.

Irak. Jatuhnya rezim otoriter tersebut menimbulkan kekosongan kekuasaan yang mengakibatkan terjadi perselisihan antara tiga kekuatan besar disana seperti kelompok Syiah yang mendapat dukungan politik pasca invasi Amerika Serikat, sedangkan kelompok Sunni yang merasa terkucilkan dari pemerintahan baru, serta kelompok etnis Kurdi yang menuntut otonomi di wilayah utara Irak.

Setelah berakhirnya invasi Amerika Serikat di Irak pada tahun 2003, konflik antara Syiah dan Sunni semakin memanas, kasus pengeboman terhadap masjid Syiah di Irak yang menewaskan ratusan orang, hal yang paling menonjol pada saat terjadi bom di masjid Imam Ali tahun 2003 di Najaf yang menewaskan Ulama Syiah Mohammad Baqir Hakim dan para peziarah Syiah, peristiwa ini membuat konflik sekretarian yang berkepanjangan di Irak. selain itu pengeboman lainnya juga terjadi di Masjid al Askari di kota Samarra pada tahun 2006 yang merupakan masjid pemakaman dua imam suci Syiah yaitu Imam Ali al Hadi dan Imam Hasan al-Askari.²⁹

Syiah melakukan serangan balik kepada Sunni dengan melakukan pengeboman juga yang menewaskan tiga ulama Sunni dan para pengikutnya. Sunni kembali melakukan penyerangan bom pada saat Syiah melaksanakan peringatan Asyura di Irak tahun 2005, 2007, 2010, 2011, 2013 dan 2014 yang menewaskan ratusan orang. Konflik yang terjadi di Irak dapat dikatakan sebagai konflik lokal pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein, namun dalam konteks yang lebih luas konflik sekretarian di Irak adalah bagian dari konflik yang melibatkan identitas Sunni dan Syiah di Timur Tengah.³⁰

Konflik etnis dan sekretarian terus berlanjut karena serangan-serangan sering dilakukan di tempat yang identik dengan sekte-sekte tersebut seperti di masjid Syiah atau masjid Sunni. Selain itu juga terjadi penyerangan di rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas umum lainnya dengan cara peledakan bom dan membuat kerusuhan dengan melakukan penculikan dan memutuskan aliran listrik.³¹

Hal ini semakin parah setelah munculnya ISIS (*Islamic State of Irak Syria*) yang menyatakan diri sebagai pembawa panji Islam murni dan menolak legitimasi pemerintahan Irak yang mereka anggap tidak sah. ISIS menolak sistem politik moderen dan mengusulkan ide pembentukan kekhalifahan global dengan jalan kekerasan atas nama agama.³²

Lahirnya ISIS (*State of Iraq and Shams*) memperjelas eskalasi konflik yang melibatkan Syiah dan Sunni, pada tahun 2014 ISIS melakukan pembantaian terhadap masyarakat Syiah di Irak. Tahanan penjara, tawanan perang dan masyarakat sipil yang beraliran Syiah menjadi sasaran pembunuhan, ISIS bahkan melakukan penayangan proses eksekusi tersebut di medianya. Kelompok militan Syiah seperti Kataib Hizbullah, Asaib al Haq dan Brigade al Sadr melakukan tindakan balasan atas perbuatan ISIS tersebut dengan cara penculikan dan pembunuhan terhadap masyarakat Sunni.³³ Namun yang harus kita pahami bahwa ISIS bukan bagian dari Sunni, mereka hanya menggunakan simbol-simbol Sunni namun tindakan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan prinsip Sunni.

b. Relevansi Konflik Politik di Irak Dengan Dinamika Politik Pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

²⁹ Prihandono Wibowo dan Ahmad Zamzamy, *Rekonsiliasi Hubungan Sunni-Syiah di Kawasan Timur Tengah*, h. 42.

³⁰ Prihandono Wibowo dan Ahmad Zamzamy, *Rekonsiliasi Hubungan Sunni-Syiah di Kawasan Timur Tengah*, *Journal of Integrative International Relations*, I, No.1 (2015), h. 42.

³¹ Gonda Yumitro, *Pergolakan Kekuatan-Kekuatan Politik Irak Pasca Saddam Hussein*, 2003.

³² Fanar Haddad, *Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity*, (Oxford: Oxford University Press, 2011), h. 45-47.

³³ Prihandono Wibowo dan Ahmad Zamzamy, *Rekonsiliasi Hubungan Sunni-Syiah di Kawasan Timur Tengah*, h. 43.

Dari pembahasan di atas yang menggambarkan bagaimana konflik politik di Irak khususnya setelah berakhirnya rezim Saddam Hussein, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai relevansi konflik tersebut dengan dinamika politik pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu:

1) Krisis Legitimasi Kekuasaan

Pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi krisis legitimasi kekuasaan terhadap kepemimpinannya, hal ini dapat kita lihat pada saat pembaiatan Ali menjadi khalifah, masih ada beberapa pihak yang menolak hal tersebut, terutama pihak yang menuntut atas kematian khalifah sebelumnya yaitu Utsman bin Affan, akibatnya selama masa kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Thalib banyak terjadi pemberontakan dari pihak yang tidak mengakui kepemimpinannya seperti Thalhah dan Zubair yang mendapat dukungan dari Aisyah serta Muawiyah dengan pasukan Syam.

Krisis legitimasi kekuasaan juga terjadi di Irak khususnya pada saat berakhirnya rezim Saddam Hussein yang memiliki kesamaan atau relevansi pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Pasca Invasi Amerika Serikat terjadi kekosongan dalam pemerintahan, Amerika Serikat kemudian membentuk pemerintahan baru namun tidak diakui oleh beberapa masyarakat Irak khususnya golongan Sunni yang merasa tersingkirkan dalam pemerintahan karena pemerintahan baru yang dibuat Amerika Serikat hanya melibatkan golongan Syiah dan Kurdi, hal ini mengakibatkan terjadi perlawanan politik dan bersenjata dari pihak yang menolak pemerintahan baru tersebut.

2) Peperangan Umat Islam dan Penyerangan antar *Sektarianisme*

Krisis legitimasi yang terjadi pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib mengakibatkan terjadinya beberapa pemberontakan dan peperangan besar, seperti Perang Jamal antara Ali dengan kubuh Aisyah, Thalhah dan Zubair yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbunuhnya Thalhah dan Zubair. Selain itu Perang Shiffin antara Ali dengan Muawiyah dengan alasan tuntutan atas meninggalnya Utsman, padahal dalam beberapa sumber ada yang mengatakan sebenarnya Muawiyah juga menginginkan atas kekhalifahan.

Akibat dari terjadinya krisis legitimasi kekuasaan di Irak pasca rezim Saddam Hussein yaitu terjadinya pengeboman di wilayah-wilayah Syiah maupun Sunni terutama di masjid-masjid yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan meninggalnya para ulama besar mereka, hal ini terjadi karena perebutan kekuasaan dalam pemerintahan antara kedua golongan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa peperangan yang terjadi pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib dan pengeboman di Irak antara golongan Syiah dan Sunni memiliki relevansi yang sama yaitu terjadi karena perebutan kekuasaan dalam pemerintahan yang sama-sama berawal dari krisis legitimasi kekuasaan.

3) Perpecahan Umat Islam dan Lahirnya Gerakan Baru

Berakhirnya Perang Shiffin pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib dengan perdamaian lewat *arbitrase* atau *tahkim* mengakibatkan perpecahan dalam umat Islam, yaitu pertama pasukan yang tetap berada dalam barisan Ali yang nantinya dikenal dengan sebutan Syiah, kedua pasukan pendukung Muawiyah di Syam, dan pasukan yang keluar dari barisan Ali yang kita kenal sebagai golongan Khawarij. Golongan Khawarij menolak keras keputusan *tahkim* karena menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak diajarkan dalam al-Qur'an sehingga mereka menentang Ali yang menerima keputusan *tahkim* bahkan memerangi dan membunuhnya.

Perpecahan *sektarian* di Irak antara Syiah dan Sunni semakin memanas setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein, perpecahan tersebut terus berlanjut dan pada akhirnya melahirkan gerakan baru yaitu ISIS yang menyatakan diri sebagai negara Islam. ISIS menolak pemerintahan moderen yang tidak menerapkan hukum Islam sehingga menganggap mereka kafir dan wajib diperangi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa munculnya ISIS di Irak disebabkan oleh konflik politik yang terjadi sama dengan latar belakang munculnya Khawarij pada

masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik ISIS maupun Khawarij merupakan golongan yang menolak pemerintahan atau kepemimpinan pada saat itu karena tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Mereka mengkafirkan sesama muslim yang berbeda pemikiran dengan mereka serta menggunakan tindakan kekerasan atas dasar keyakinan agama yang salah atas penafsiran mereka sendiri.

2. Permasalahan Politik di Indonesia dan Relevansinya Dengan Dinamika Politik Pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

a. Pemilihan Pemimpin Secara *Syura* atau Demokrasi

Secara terminologi *syura* adalah majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam masalah-masalah kenegaraan. *Syura* secara umum bermakna sebagai bentuk penyampaian dan tukar pendapat dalam musyawarah, sedangkan secara khusus *syura* adalah ketentuan yang harus dijalankan sebagai keputusan jamaah. Jadi dapat disimpulkan bahwa *syura* secara sederhana adalah musyawarah, yaitu saling tukar pendapat mengenai suatu masalah untuk menemukan keputusan atau kesepakatan bersama yang dapat diikuti secara bersama.³⁴

Demokrasi secara terminologi merupakan konsep yang mengungkapkan sebuah karakter sistem politik yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam perkembangan selanjutnya demokrasi menjadi sebuah sistem pemerintahan yang ideal dan banyak negara yang menerapkannya termasuk di Indonesia. Demokrasi di Indonesia disebut sebagai demokrasi pancasila yang artinya kedaulatan berdasarkan nilai-nilai pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.³⁵

Sistem pemilihan pemimpin dalam sejarah Islam telah menggambarkan bentuk awal praktek demokrasi dengan metode musyawarah, hal ini dapat kita lihat pada saat Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah lewat musyawarah atau *syura* antar para sahabat setelah wafatnya khalifah sebelumnya yaitu Utsman, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya khususnya yang membahas tentang proses pengangkatan khalifah Ali bin Abi Thalib yang berdampak sampai perpecahan umat Islam. Adapun di Indonesia pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara demokrasi pancasila dalam artian pelaksanaannya sesuai dengan landasan pancasila.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan sila keempat pancasila yang berbunyi, "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*". Pemilu yang dilakukan dalam memilih seorang pemimpin baik itu presiden, gubernur, bupati, lembaga legislatif ataupun pemimpin daerah merupakan bentuk nyata dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang didasarkan atas asas musyawarah dan mufakat yang mana hal ini juga di atur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".³⁶

Jadi dapat dikatakan bahwa pemilihan pemimpin di Indonesia berdasarkan demokrasi pancasila yang berlangsung secara musyawarah lewat pemilu sebenarnya sudah digambarkan secara sederhana pada masa *Khulafur Rasyidin* termasuk pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib yang terpilih atas musyawarah atau kesepakatan para sahabat yang kita kenal dengan istilah *syura*.

Dengan demikian pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia bukan sekedar hasil adopsi dari sistem Barat, tetapi ternyata ada integrasi nilai-nilai keislaman didalamnya

³⁴ Husni A. Jalil, dkk, *Konsep Syūrā Menurut Yūsuf AL-Qadarawi dan Relevansinya Dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, I, No. 1, (2022), h. 100.

³⁵ Husni A. Jalil, dkk, *Konsep Syūrā Menurut Yūsuf AL-Qadarawi dan Relevansinya Dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, h. 104.

³⁶ Ambar Wida Astuti Aprillia, dkk, *Nilai Demokrasi Indonesia Belandaskan Pancasila dan UUD 1945*, Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, X, No. 1, (2021), h. 63.

yaitu prinsip *syura* yang sudah digambarkan sejak masa *Khulafaur Rasyidin* termasuk pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun pada dasarnya pelaksanaan musyawarah dalam sejarah politik Islam sudah ada sejak masa Rasulullah yang digambarkan dalam pengambilan keputusan-keputusan berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabatnya.

b. Adanya Pihak Yang Menolak Pemerintahan Hasil Dari *Syura* dan Demokrasi

Metode pemilihan pemimpin secara *syura* pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib dan demokrasi yang berlandaskan Pancasila lewat pemilu di Indonesia ternyata menimbulkan permasalahan bagi beberapa pihak yang bahkan masih dapat kita lihat sampai saat ini. Pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib khususnya pada saat beliau dibaiat menjadi khalifah tidak berjalan lancar seperti halnya dengan pembaiatan para khalifah sebelumnya karena Ali dibaiat ditengah permasalahan atas meninggalnya Utsman, sehingga masih ada pihak-pihak yang tidak mengakui bahkan menolak kepemimpinannya.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia yang dapat kita lihat pada saat pelaksanaan pemilu dalam rangka memilih pemimpin negara, seperti pada saat pemilihan presiden tahun 2024 antara pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka dengan Anis Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat menjadi dua kubu pendukung masing-masing pilihannya.

Permasalahan pilpres 2024 yang berdampak terhadap terpecahnya masyarakat sebenarnya sudah kita saksikan sebelum pemilihan dilaksanakan, seperti pada saat majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Prabowo Subianto sudah muncul pro dan kontra, karena Gibran dianggap belum memenuhi syarat sebagai wakil presiden sesuai aturan Undang-Undang pemilu yang mana usia calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun, namun pada pilpres tahun lalu Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah persyaratannya sehingga Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden, beberapa pihak dan masyarakat menganggap bahwa aturan tersebut diubah untuk Gibran yang berstatus sebagai anak presiden pada saat itu.

Meskipun penulis tidak menemukan sumber tertulis seperti jurnal ataupun hasil penelitian yang membahas secara khusus mengenai permasalahan yang timbul pasca pilpres tahun lalu, namun dengan perkembangan zaman sekarang ini dapat kita lihat secara langsung bahwa masih ada pihak ataupun masyarakat yang tidak menerima hasil pemilu

tersebut. Pihak yang menolak keputusan tersebut berpendapat bahwa adanya kesalahan bahkan kecurangan dalam proses pemilu. Hal ini dapat kita lihat di media sosial yang sampai sekarang masih sering mengungkit dan saling menyerang satu sama lain atas keputusan hasil pemilu dalam pemilihan presiden tahun lalu.

Namun beberapa artikel menyatakan bahwa pasca pengumuman hasil pemilihan presiden 2024, sebagian massa pendukung dari kedua kubu menunjukkan ketegangan yang terlihat dalam aksi protes, saling menuduh dan tersebarinya ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Meskipun perselisihan antar kedua kubu pendukung tersebut tidak sampai terjadi bentrok secara fisik.³⁷ Dalam artikel lain juga dijelaskan bahwa ketika lembaga pengadilan menolak seluruh gugatan atas kemenangan Prabowo dalam pilpres 2024, sejumlah aktivis pendukung Anies melakukan aksi protes menuntut adanya dugaan intervensi negara dalam pemilu, sementara itu dikubu pendukung Prabowo sebagai presiden terpilih menegaskan jika hal ini terus berlanjut maka justru akan melemahkan legitimasi dan berpotensi memicu munculnya krisis konstitusi.³⁸

Kesimpulan

Dampak dinamika politik yang terjadi pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib

³⁷ <https://apnews.com/article/indonesia-election-fra-ud-claims>

³⁸ <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/legal-team-indonesias-president-ele>

khususnya setelah berakhirnya masa *khulafaur rasyidin* menjadi babak baru dalam pemerintahan Islam yaitu terbentuknya sistem pemerintahan baru oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang mengubah sistem pemerintahan dari bentuk demokrasi menjadi monarki pada masa dinasti Umayyah yang kemudian mengalami perkembangan di masa berikutnya. Dalam konteks moderen, dinamika politik yang terjadi pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib ternyata memiliki relevansi dengan konflik politik di negara-negara Islam seperti di Irak dan Indonesia, dimana dapat kita lihat konflik terjadi karena adanya krisis legitimasi kekuasaan seperti pada masa kepemimpinan Ali. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nilai-nilai kepemimpinan khalifah Ali seperti keadilan, musyawarah dan tanggungjawab tetap relevan untuk dijadikan sebagai acuan moral dalam membangun sistem politik yang beretika dan berkeadilan di era moderen.

Implikasi

Penulis berharap agar tulisan ini dapat menambah dan memperkuat pemahaman kita tentang sejarah politik Islam khususnya tentang dampak dan pengaruh dinamika politik pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib yang kemudian bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam menyelesaikan konflik politik yang terjadi di negara-negara muslim era moderen, seperti nilai-nilai keadilan, musyawarah dan tanggungjawab kepemimpinan yang masih relevan dalam studi politik sampai saat ini.

Penulis juga berharap agar dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian kedepannya untuk meningkatkan wawasan kita mengenai sejarah politik dalam Islam. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat sederhana dan banyak kekurangan dalam penyusunannya, jadi penulis berharap adanya pengembangan kedepannya terhadap topik pembahasan tersebut sehingga pemahaman kita bisa lebih luas lagi mengenai dampak dan peparuh dinamika politik pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib yang ternyata memiliki relevansi dengan kondisi politik di negara-negara Islam moderen sekarang.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011).
- Aizid, Rizem, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, (Cet. I; Yogyakarta: Diva Press, 2021).
- A Jalil, Husni, dkk, *Konsep Syūrā Menurut Yūsuf AL-Qadarawi dan Relevansinya Dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, I, No. 1, (2022).
- Al-Azizi, Abdul Syukur, *Biografi Lengkap Ali Bin Abi Thalib Ra. :Kecerdasan Hati dan Akal Penggenggam Panji Nabi Saw.*, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit DIVA Press, 2021).
- , *Sejarah Terlengkap Peradaban Islam: Menelusuri Jejak-Jejak Agung Peradaban di Barat dan Timur*, (Cet. I; Yogyakarta: Noktah, 2017).
- Ambar, Aprilli, dkk, *Nilai Demokrasi Indonesia Belandaskan Pancasila dan UUD 1945*, Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, X, No. 1, (2021).
- As-Suyithi, Imam, *Tarikh Khulafa*, (Cet. I; Jakarta: Qisthi Press, 2019).
- Dahlan, *Sejarah Peradaban Islam*, 2013
- Dzofir, Mohammad, *Akar Teori Konflik*, Jurnal Al- Burhan, IX, No. 1 (2017).
- Eva syarifah Wardah, *Metode Penelitian Sejarah*, Tsaqofah, 12. No. 7, (2014).
- Haddad, Fanar, *Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity*, (Oxford: Oxford University Press, 2011).
- Hamzah, Saidin, dan Hamriana, *Khulafah Al-Rasyidun: Masa Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib*, Jurnal Sejarah dan Budaya, I (2022).
- Haris, Munawir, *Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah*,

- TASAMUH: Jurnal Studi Islam, X, No. 2, (2018).
- Hasaruddin, *Muawiyah Ibn Abi Sofyan Dari Syura Ke Monarki*, (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2014).
- Husaini, Al Hamid, *Imamul Muhtadin: Kisah Suka dan Duka Saiyidina Ali bin Abu Thalib*, (Cet. I; Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1995).
- Ibrahim, Arfah, *Muawiyah bin Abu Sufyan Tactics in Beating Ali bin Abi Thalib*, SHIBGHAH: *Journal of Muslim Societies*, II. No. 1 (2020).
- Ikhsan, Muh, *Politik Islam: Telaah Historis Monarchisme Mu'awiyah dan konflik Yang Mengitarinya*, Jurnal Al-'Adl, VI, No. 2, (2013).
- Iqbal, Muhammad, dkk, *Comparison Of The Reign Of Caliph Abu Bakar With Caliph Ali Bin Abi Thalib*, Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah, VII, No. 1, (2023).
- Katsir, Ibnu, *'Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*, Penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2004).
- Katsir, Imam Ibnu, *Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung*, (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2002).
- Lathif, Abdussuyafi Muhammad Abdul, *Al-Alam Al-Islami Fil Ashr Al-Umawi*, 2008.
- Nabila, Aisyah, *Perubahan Sosial dan Politik Irak Pasca Invasi Amerika Serikat*, Jurnal Ilmu Budaya, (2023).
- Nasution, Harun, *Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam*, 1995.
- Noor, Juliasnyah, *Metodelogi Penelitian Skripsi ,Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Cet.I Jakarta: Kencana, 2011).
- Wahab, Fatkhul, *'Sejarah Dan Perkembangan Dinasti Bani Umayyah Dalam Dunia Islam'*, *Jurnal Pustaka*, XIII (2023).
- Wibowo, Prihandono, dan Ahmad Zamzamy, *Rekonsiliasi Hubungan Sunni-Syiah di Kawasan Timur Tengah*, Timur Tengah Journal of Integrative International Relations, I, No. 1, (2015).
- Yeni, Fitri, *Sejarah Peradaban Muslim di Damaskus (Syiria) (Masa Daulah Umayyah)*, AL-BAHRU: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, III, No. 2 (2024).
- Yusalia, Henny, *Daulah Umayyah: Ekspansi dan Sistem Pemerintahan Monarchiheridetis*, Jurnal Wardah XIII, No. 2, (2015).